



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 /PMK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* masih diperlukan pemberian insentif perpajakan, sehingga diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan kapasitas fiskal untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
- b. bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif;
- c. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pemberian insentif:
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - c. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - d. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - e. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),
diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.
- (2) Jangka waktu pemberian insentif pembebasan

dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

- (3) Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.
- (4) Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya berlaku untuk Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang:
 - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran:
 1. kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;
 2. kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
 3. kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; atau
 4. kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; dan/atau
 - c. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.

2. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dengan:
 - a. menyampaikan Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; dan/atau
 - b. mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor; menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk memanfaatkan insentif, harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
- (3) Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atas:
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah; dan/atau
 - b. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25;harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau Pasal 12 ayat (1) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.

- (4) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 harus menyampaikan kembali permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19B

- (1) Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sejak Masa Pajak Juli 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.
- (2) Pemberi Kerja, Wajib Pajak, dan/atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan pemanfaatan insentif:
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

b. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau

c. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);

dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021.

3. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 743

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 82/PMK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK
UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN
INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
1	01111	PERTANIAN TANAMAN JAGUNG
2	01112	PERTANIAN TANAMAN GANDUM
3	01113	PERTANIAN TANAMAN KEDELAI
4	01114	PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH
5	01115	PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU
6	01120	PERTANIAN PADI
7	01132	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH
8	01133	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH
9	01134	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI
10	01135	PERTANIAN TANAMAN UMBI-UMBIA PALAWIJA
11	01136	PERTANIAN TANAMAN JAMUR
12	01139	PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA
13	01140	PERKEBUNAN TEBU
14	01150	PERKEBUNAN TEMBAKAU
15	01193	PERTANIAN TANAMAN BUNGA
16	01194	PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA
17	01220	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS
18	01230	PERTANIAN BUAH JERUK
19	01261	PERKEBUNAN BUAH KELAPA
20	01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT
21	01269	PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA
22	01270	PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN
23	01281	PERKEBUNAN LADA
24	01282	PERKEBUNAN CENGKEH
25	01284	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR
26	01285	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG
27	01286	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG
28	01289	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA
29	01291	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA
30	01301	PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA
31	01302	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN HORTIKULTURA LAINNYA BUKAN BUNGA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
32	01411	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG
33	01412	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH
34	01413	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG
35	01461	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING
36	01462	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR
37	01611	JASA PENGOLAHAN LAHAN
38	01612	JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN JASAD PENGGANGGU
39	01613	JASA PEMANENAN
40	01614	JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA
41	01619	JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA
42	01621	JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK
43	01622	JASA PEMACEKAN TERNAK
44	01623	JASA PENETASAN TELUR
45	01629	JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA
46	01630	JASA PASCA PANEN
47	01702	PENANGKARAN SATWA LIAR
48	02111	PENGUSAHAAN HUTAN JATI
49	02112	PENGUSAHAAN HUTAN PINUS
50	02113	PENGUSAHAAN HUTAN MAHONI
51	02114	PENGUSAHAAN HUTAN SONOKELING
52	02115	PENGUSAHAAN HUTAN ALBASIA/JEUNJING
53	02116	PENGUSAHAAN HUTAN CENDANA
54	02117	PENGUSAHAAN HUTAN AKASIA
55	02118	PENGUSAHAAN HUTAN EKALIPTUS
56	02119	PENGUSAHAAN HUTAN LAINNYA
57	02120	PENGUSAHAAN HUTAN ALAM
58	02131	PENGUSAHAAN ROTAN
59	02132	PENGUSAHAAN GETAH PINUS
60	02133	PENGUSAHAAN DAUN KAYU PUTIH
61	02134	PENGUSAHAAN BAMBU
62	02135	PENGUSAHAAN DAMAR
63	02136	PENGUSAHAAN GAHARU
64	02139	PENGUSAHAAN HUTAN BUKAN KAYU LAINNYA
65	02301	PEMUNGUTAN GETAH KARET
66	02302	PEMUNGUTAN ROTAN
67	02303	PEMUNGUTAN GETAH PINUS
68	02304	PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH
69	02305	PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA
70	02306	PEMUNGUTAN DAMAR
71	02307	PEMUNGUTAN MADU
72	02308	PEMUNGUTAN BAMBU
73	02309	PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA
74	02401	JASA KEHUTANAN BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
75	02402	JASA KEHUTANAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
76	02403	JASA KEHUTANAN BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN KEHUTANAN SOSIAL
77	02409	JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA
78	03111	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT
79	03112	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT
80	03113	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT
81	03114	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT
82	03115	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT
83	03116	PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT
84	03117	PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT
85	03118	PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT
86	03119	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
87	03121	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM
88	03122	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM
89	03123	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM
90	03124	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM
91	03125	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM
92	03129	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM
93	03131	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
94	03132	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
95	03133	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
96	03141	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
97	03142	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
98	03143	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM
99	03211	PEMBESARAN IKAN LAUT
100	03212	PEMBENIHAN IKAN LAUT
101	03213	BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT
102	03214	BUDIDAYA KARANG (CORAL)
103	03221	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM
104	03222	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG
105	03223	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA
106	03224	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH
107	03225	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR
108	03226	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR
109	03231	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT
110	03232	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT
111	03241	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
112	03242	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
113	03243	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR
114	03251	PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU
115	03252	PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU
116	03261	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
117	03262	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
118	03263	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU
119	05101	PERTAMBANGAN BATU BARA
120	06100	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
121	06201	PERTAMBANGAN GAS ALAM
122	06202	PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI
123	07101	PERTAMBANGAN PASIR BESI
124	07102	PERTAMBANGAN BIJIH BESI
125	07291	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH
126	07292	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM
127	07293	PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT
128	07294	PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA
129	07295	PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
130	07296	PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN
131	07299	PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI
132	07301	PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK
133	07309	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA
134	08999	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL
135	09100	JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
136	09900	JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA
137	10110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS
138	10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS
139	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS
140	10211	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN
141	10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
142	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN
143	10214	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN
144	10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN
145	10216	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI
146	10217	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN
147	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN
148	10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG
149	10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG
150	10291	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA
151	10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA
152	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
153	10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA
154	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA
155	10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA
156	10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA
157	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA
158	10311	INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
159	10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
160	10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
161	10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
162	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG
163	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN
164	10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI
165	10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI
166	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
167	10411	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI
168	10412	INDUSTRI MARGARINE
169	10413	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN
170	10414	INDUSTRI MINYAK IKAN
171	10415	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT
172	10421	INDUSTRI KOPRA
173	10422	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA
174	10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA
175	10424	INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA
176	10431	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL)
177	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
178	10490	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA
179	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM
180	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
181	10531	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM
182	10532	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)
183	10590	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA
184	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN
185	10612	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI
186	10613	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENGERINGAN KAKAO
187	10614	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO
188	10615	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN
189	10616	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMASUK RIZOMA)
190	10617	INDUSTRI TEPUNG TERIGU
191	10618	INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN,

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
192	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU
193	10622	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA
194	10623	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA
195	10629	INDUSTRI PATI LAINNYA
196	10631	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS
197	10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG
198	10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG
199	10634	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG
200	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
201	10721	INDUSTRI GULA PASIR
202	10722	INDUSTRI GULA MERAH
203	10723	INDUSTRI SIROP
204	10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP
205	10731	INDUSTRI KAKAO
206	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA
207	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING
208	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA
209	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
210	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
211	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH
212	10762	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)
213	10771	INDUSTRI KECAP
214	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
215	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA
216	10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM
217	10779	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA
218	10791	INDUSTRI MAKANAN BAYI
219	10792	INDUSTRI KUE BASAH
220	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU
221	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
222	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
223	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
224	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
225	11010	INDUSTRI MINUMAN KERAS
226	11020	INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE)
227	11030	INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT
228	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
229	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
230	11090	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA
231	12011	INDUSTRI ROKOK KRETEK
232	12012	INDUSTRI ROKOK PUTIH
233	12019	INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA
234	12091	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU
235	12099	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA
236	13111	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL
237	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
238	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
239	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
240	13122	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT
241	13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN
242	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
243	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
244	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
245	13134	INDUSTRI BATIK
246	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
247	13912	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR
248	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN
249	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
250	13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN
251	13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA
252	13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN
253	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
254	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
255	13941	INDUSTRI TALI
256	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
257	13991	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)
258	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
259	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)
260	13994	INDUSTRI KAIN BAN
261	13995	INDUSTRI KARUNG GONI
262	13996	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI
263	13997	INDUSTRI KAPUK
264	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
265	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
266	14112	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT
267	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN
268	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL
269	14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT
270	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU
271	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
272	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR
273	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA
274	15111	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT
275	15112	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT
276	15113	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU
277	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI
278	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
279	15122	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI
280	15123	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN
281	15129	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA
282	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
283	15202	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA
284	15203	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI
285	15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA
286	16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
287	16102	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU
288	16103	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA
289	16104	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN
290	16211	INDUSTRI KAYU LAPIS
291	16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD
292	16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA
293	16214	INDUSTRI VENEER
294	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU
295	16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU
296	16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU
297	16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU
298	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU
299	16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER
300	16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
301	16295	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU
302	16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL
303	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
304	17012	INDUSTRI KERTAS BUDAYA
305	17013	INDUSTRI KERTAS BERHARGA
306	17014	INDUSTRI KERTAS KHUSUS
307	17019	INDUSTRI KERTAS LAINNYA
308	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG
309	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
310	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE
311	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL
312	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
313	18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS
314	18120	JASA PENUNJANG PENCETAKAN
315	18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK
316	18202	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO
317	19100	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA
318	19211	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI
319	19212	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM
320	19213	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS
321	19214	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS
322	19291	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI
323	19292	INDUSTRI BRIKET BATU BARA
324	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
325	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI
326	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN
327	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
328	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
329	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN
330	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA
331	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
332	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
333	20121	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER
334	20122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER
335	20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER
336	20124	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER
337	20125	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER
338	20126	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO
339	20127	INDUSTRI PUPUK PELENGKAP
340	20129	INDUSTRI PUPUK LAINNYA
341	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK
342	20132	INDUSTRI KARET BUATAN
343	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)
344	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)
345	20213	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH
346	20214	INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH)
347	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK
348	20222	INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK)
349	20223	INDUSTRI LAK
350	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA
351	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI
352	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM
353	20292	INDUSTRI BAHAN PELEDAK
354	20293	INDUSTRI TINTA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
355	20294	INDUSTRI MINYAK ATSIRI
356	20295	INDUSTRI KOREK API
357	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
358	20301	INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN
359	20302	INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN
360	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI
361	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI
362	21021	INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL)
363	21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL
364	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM
365	22112	INDUSTRI VULKANISIR BAN
366	22121	INDUSTRI PENGASAPAN KARET
367	22122	INDUSTRI REMILING KARET
368	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
369	22191	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
370	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
371	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL
372	22210	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN
373	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
374	22230	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA
375	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
376	22292	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)
377	22293	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK
378	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL
379	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN
380	23112	INDUSTRI KACA PENGAMAN
381	23119	INDUSTRI KACA LAINNYA
382	23121	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA
383	23122	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA
384	23123	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA
385	23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA
386	23911	INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API
387	23919	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA
388	23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
389	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK
390	23923	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN
391	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG
392	23931	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN
393	23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
394	23933	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN
395	23939	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN
396	23941	INDUSTRI SEMEN
397	23942	INDUSTRI KAPUR
398	23943	INDUSTRI GIPS
399	23951	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN
400	23952	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR
401	23953	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI
402	23954	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI
403	23955	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
404	23956	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
405	23957	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI
406	23959	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA
407	23961	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
408	23962	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
409	23963	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
410	23969	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA
411	23990	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL
412	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)
413	24102	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)
414	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI
415	24201	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA
416	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
417	24203	INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI
418	24204	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI
419	24205	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
420	24206	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM
421	24310	INDUSTRI PENGEORAN BESI DAN BAJA
422	24320	INDUSTRI PENGEORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
423	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
424	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
425	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN
426	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA
427	25120	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM
428	25130	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS
429	25200	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI
430	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
431	25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
432	25931	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN
433	25932	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN
434	25933	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA
435	25934	INDUSTRI PERALATAN UMUM
436	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM
437	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT
438	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
439	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA
440	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM
441	25993	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA
442	25994	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL
443	25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM
444	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL
445	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK
446	26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
447	26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
448	26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER
449	26310	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI
450	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
451	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
452	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI
453	26420	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI
454	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
455	26511	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL
456	26512	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
457	26513	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK
458	26514	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI
459	26520	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU
460	26601	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA
461	26602	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI
462	26710	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI
463	26791	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA
464	26792	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA
465	26800	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK
466	27111	INDUSTRI MOTOR LISTRIK
467	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK
468	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN
469	27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
470	27201	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
471	27202	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER)
472	27310	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK
473	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
474	27330	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL
475	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET
476	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)
477	27403	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI
478	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA
479	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
480	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA
481	27530	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA
482	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
483	28111	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR
484	28112	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM
485	28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN
486	28120	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS
487	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
488	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
489	28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK
490	28152	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK
491	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
492	28171	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL
493	28172	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK
494	28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK
495	28174	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI
496	28179	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA
497	28180	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA
498	28191	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN
499	28192	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN
500	28193	INDUSTRI MESIN PENDINGIN
501	28199	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL
502	28210	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
503	28221	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan LOGAM
504	28222	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan KAYU
505	28223	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU
506	28224	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
507	28230	INDUSTRI MESIN METALURGI
508	28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI
509	28250	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
510	28261	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT
511	28262	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA
512	28263	INDUSTRI MESIN TEKSTIL
513	28264	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA
514	28265	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT
515	28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN
516	28292	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS
517	28299	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL
518	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
519	29200	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER
520	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
521	30111	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU
522	30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG
523	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL
524	30120	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA
525	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
526	30300	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA
527	30400	INDUSTRI KENDARAAN PERANG
528	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
529	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
530	30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK
531	30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK
532	30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL
533	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
534	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU
535	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK
536	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM
537	31009	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA
538	32111	INDUSTRI PERMATA
539	32112	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
540	32113	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
541	32114	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM
542	32115	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA
543	32119	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA
544	32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS
545	32201	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL
546	32202	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL
547	32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA
548	32401	INDUSTRI ALAT PERMAINAN
549	32402	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK
550	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
551	32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC
552	32503	INDUSTRI KACA MATA
553	32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA
554	32901	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA
555	32902	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
556	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL
557	32904	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN
558	32905	INDUSTRI DARI SABUT KELAPA
559	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL
560	33111	JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP
561	33112	JASA REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI
562	33119	JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA
563	33121	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM
564	33122	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
565	33131	JASA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL
566	33132	JASA REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI
567	33133	JASA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK
568	33141	JASA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR
569	33142	JASA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK
570	33149	JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
571	33151	JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG
572	33152	JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
573	33153	JASA REPARASI PESAWAT TERBANG
574	33159	JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR
575	33190	JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA
576	33200	JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI
577	35101	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
578	35201	PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN
579	35202	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN
580	36001	PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM
581	36002	PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU
582	36003	JASA PENUNJANG PENGADAAN AIR
583	38302	DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM
584	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
585	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
586	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI
587	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
588	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
589	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
590	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN
591	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN
592	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
593	41020	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
594	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
595	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
596	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
597	42114	KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API
598	42115	KONSTRUKSI TEROWONGAN
599	42120	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API
600	42211	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI
601	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
602	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
603	42214	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI
604	42215	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA
605	42216	KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
606	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
607	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
608	42219	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
609	42220	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
610	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
611	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN
612	42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
613	42914	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS
614	42915	PENGERUKAN
615	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
616	42920	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA
617	43110	PEMBONGKARAN
618	43120	PENYIAPAN LAHAN
619	43211	INSTALASI LISTRIK
620	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI
621	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI
622	43214	INSTALASI NAVIGASI UDARA
623	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
624	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
625	43217	INSTALASI ELEKTRONIKA
626	43221	INSTALASI AIR (PIPA)
627	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL
628	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS
629	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
630	43291	INSTALASI MEKANIKAL
631	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL
632	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM
633	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON
634	43303	PENGECATAN
635	43304	DEKORASI INTERIOR
636	43305	DEKORASI EKSTERIOR
637	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
638	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
639	43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)
640	43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING
641	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA
642	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR
643	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL
644	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
645	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
646	46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA
647	46202	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK
648	46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN
649	46204	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN
650	46205	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP
651	46206	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN
652	46207	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
653	46208	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT
654	46209	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA
655	46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS
656	46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN
657	46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN
658	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO
659	46315	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
660	46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
661	46321	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN
662	46322	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN
663	46323	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA
664	46324	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN
665	46325	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR
666	46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU
667	46327	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI
668	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA
669	46332	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI
670	46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL
671	46334	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU
672	46335	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU
673	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA
674	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL
675	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN
676	46413	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI
677	46414	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL
678	46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA
679	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR
680	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK
681	46430	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK
682	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
683	46492	PERDAGANGAN BESAR FARMASI
684	46493	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL
685	46494	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK
686	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA
687	46496	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK
688	46497	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM
689	46498	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK
690	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
691	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
692	46512	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
693	46521	PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK
694	46522	PERDAGANGAN BESAR DISKET, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG
695	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
696	46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN
697	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
698	46592	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
699	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
700	46594	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
701	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
702	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
703	46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM
704	46631	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI
705	46632	PERDAGANGAN BESAR KACA
706	46633	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA
707	46634	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
708	46635	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN
709	46636	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU
710	46637	PERDAGANGAN BESAR CAT
711	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
712	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA
713	46691	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR
714	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA
715	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
716	46694	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR
717	46695	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON
718	46696	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON
719	46697	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)
720	46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
721	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR
722	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET
723	47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL)
724	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)
725	47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)
726	47211	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA
727	47212	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN
728	47213	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN
729	47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN
730	47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN
731	47216	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
732	47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
733	47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL
734	47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL
735	47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO
736	47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS
737	47242	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA
738	47243	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH
739	47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM
740	47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN
741	47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA
742	47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU
743	47302	PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO
744	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
745	47412	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA
746	47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
747	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
748	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR
749	47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO
750	47511	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL
751	47512	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL
752	47513	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT
753	47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
754	47522	PERDAGANGAN ECERAN KACA
755	47523	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA
756	47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU
757	47525	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN
758	47526	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU
759	47527	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK
760	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
761	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA
762	47530	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO
763	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
764	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
765	47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK
766	47594	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT
767	47595	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
768	47596	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
769	47597	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK
770	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759
771	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
772	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
773	47620	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO
774	47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO
775	47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO
776	47650	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON
777	47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN
778	47712	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA
779	47713	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN
780	47714	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA
781	47721	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA
782	47722	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK
783	47723	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK
784	47724	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL
785	47725	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK
786	47726	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN
787	47727	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)
788	47729	PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727
789	47731	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA
790	47732	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
791	47733	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA
792	47734	PERDAGANGAN ECERAN JAM
793	47735	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN
794	47736	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
795	47737	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK
796	47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL
797	47741	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
798	47742	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS
799	47743	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS
800	47744	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS
801	47745	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS
802	47746	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK
803	47749	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA
804	47752	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK
805	47753	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS
806	47754	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN
807	47761	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST
808	47762	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT
809	47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
810	47764	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS
811	47781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA
812	47782	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN
813	47783	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM
814	47784	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK
815	47785	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN
816	47789	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA
817	47791	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA
818	47792	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA
819	47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
820	47794	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA
821	47795	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA
822	47796	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN
823	47797	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN
824	47811	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA
825	47812	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN
826	47813	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN
827	47814	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN
828	47815	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN
829	47816	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN
830	47819	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
831	47821	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS
832	47822	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA
833	47823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA
834	47824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM
835	47825	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN BIOTA AIR OLAHAN
836	47826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN
837	47827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU
838	47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
839	47829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL
840	47831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL
841	47832	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN
842	47833	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA
843	47834	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG
844	47841	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA
845	47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI
846	47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL
847	47844	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK
848	47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
849	47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)
850	47849	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL
851	47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA
852	47852	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN
853	47853	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM
854	47854	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA
855	47855	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR
856	47859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA
857	47861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK
858	47862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK
859	47863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN
860	47864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT
861	47865	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
862	47866	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN
863	47867	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN
864	47869	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA
865	47871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS
866	47872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
867	47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
868	47874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK
869	47875	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA
870	47876	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR
871	47877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI
872	47879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA
873	47881	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN
874	47882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK
875	47883	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN
876	47891	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP
877	47892	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
878	47893	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK
879	47894	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
880	47895	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS
881	47896	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS
882	47897	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN
883	47899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA
884	47911	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM
885	47912	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI
886	47913	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR
887	47914	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913
888	47919	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA
889	47920	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
890	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
891	49112	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA
892	49121	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG
893	49129	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA
894	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
895	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN
896	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
897	49214	ANGKUTAN BUS KOTA
898	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA
899	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS
900	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
901	49300	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
902	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS
903	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS
904	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN
905	49414	ANGKUTAN PERDESAAN
906	49421	ANGKUTAN TAKSI
907	49422	ANGKUTAN SEWA
908	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
909	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
910	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA
911	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
912	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
913	49432	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS
914	49433	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
915	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
916	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
917	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA
918	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
919	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
920	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
921	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA
922	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG
923	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
924	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG
925	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
926	50135	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT
927	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG
928	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
929	50143	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG
930	50144	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT
931	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR
932	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK
933	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK
934	50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
935	50215	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
936	50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
937	50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
938	50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
939	50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN
940	50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS
941	50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
942	50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
943	50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
944	50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
945	50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
946	50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
947	50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN
948	51101	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
949	51102	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
950	51103	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG
951	51104	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
952	51105	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
953	51106	ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA
954	51107	ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA
955	51109	ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA
956	51201	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
957	51202	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
958	51203	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG
959	51204	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
960	51205	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
961	52101	PERGUDANGAN
962	52102	JASA COLD STORAGE
963	52103	JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT
964	52109	JASA PERGUDANGAN LAINNYA
965	52211	JASA TERMINAL DARAT
966	52213	JASA JALAN TOL
967	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
968	52221	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT
969	52222	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU
970	52223	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN
971	52229	JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA
972	52230	JASA KEBANDARUDARAAN
973	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)
974	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)
975	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
976	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL
977	53200	KURIR
978	55111	HOTEL BINTANG LIMA
979	55112	HOTEL BINTANG EMPAT
980	55113	HOTEL BINTANG TIGA
981	55114	HOTEL BINTANG DUA
982	55115	HOTEL BINTANG SATU
983	55120	HOTEL MELATI
984	55130	PONDOK WISATA (HOME STAY)
985	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
986	55192	BUMI PERKEMAHAN
987	55193	PERSINGGAHAN KARAVAN
988	55194	VILA
989	55195	APARTEMEN HOTEL
990	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
991	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA
992	56101	RESTORAN
993	56102	WARUNG MAKAN
994	56103	KEDAI MAKANAN
995	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
996	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
997	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
998	56301	BAR
999	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN
1000	56303	RUMAH MINUM/KAFE
1001	56304	KEDAI MINUMAN
1002	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
1003	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
1004	58110	PENERBITAN BUKU
1005	58120	PENERBITAN BUKU DIREKTORI DAN MAILING LIST
1006	58130	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, BULETIN DAN MAJALAH
1007	58190	PENERBITAN LAINNYA
1008	58200	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
1009	59111	PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH
1010	59112	PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA
1011	59121	PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH
1012	59122	PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA
1013	59131	DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH
1014	59132	DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA
1015	59140	KEGIATAN PEMUTARAN FILM
1016	59201	PEREKAMAN SUARA
1017	59202	PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK
1018	60101	PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH
1019	60102	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA
1020	60201	PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH
1021	60202	PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
1022	61100	TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL
1023	61200	TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL
1024	61300	TELEKOMUNIKASI SATELIT
1025	61911	JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL)
1026	61912	JASA RADIO PANGGIL UNTUK UMUM (RPUU)
1027	61913	JASA RADIO TRUNKING
1028	61914	WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL)
1029	61919	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA
1030	61921	INTERNET SERVICE PROVIDER
1031	61922	JASA SISTEM KOMUNIKASI
1032	61923	JASA VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP)
1033	61924	WARUNG INTERNET (WARNET)
1034	61929	JASA MULTIMEDIA LAINNYA
1035	61991	TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN
1036	61999	TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL
1037	62010	KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER
1038	62090	KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
1039	63111	KEGIATAN PENGOLAHAN DATA
1040	63120	PORTAL WEB
1041	63911	KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH
1042	63912	KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH SWASTA
1043	64140	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM
1044	64922	PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS CREDIT)
1045	64999	JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN
1046	65111	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL
1047	65112	ASURANSI JIWA SYARIAH
1048	65121	ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL
1049	65122	ASURANSI NON JIWA SYARIAH
1050	66197	JASA PENUKARAN MATA UANG (MONEY CHANGER)
1051	66199	JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL
1052	66221	JASA AGEN ASURANSI
1053	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
1054	68120	KAWASAN PARIWISATA
1055	68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
1056	69100	JASA HUKUM
1057	69200	JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK
1058	70201	JASA KONSULTAN PARIWISATA
1059	70202	JASA KONSULTAN TRANSPORTASI
1060	70209	KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
1061	71100	JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI
1062	71202	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM
1063	71203	JASA INSPEKSI
1064	71204	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI
1065	71205	JASA KALIBRASI/METROLOGI
1066	71209	JASA ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA
1067	72102	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA
1068	72201	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
1069	72202	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA
1070	73100	PERIKLANAN
1071	73200	PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT
1072	74100	JASA PERANCANGAN KHUSUS
1073	74201	JASA FOTOGRAFI
1074	74902	JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS
1075	77100	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
1076	77210	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA
1077	77295	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK
1078	77301	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI
1079	77302	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
1080	77303	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR
1081	77304	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA
1082	77306	JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL
1083	77400	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA
1084	78101	JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
1085	78102	JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
1086	78103	JASA PENYALURAN TENAGA KERJA
1087	78200	JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU
1088	78300	JASA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA
1089	79111	JASA AGEN PERJALANAN WISATA
1090	79112	JASA AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA
1091	79120	JASA BIRO PERJALANAN WISATA
1092	79910	JASA INFORMASI PARIWISATA
1093	79920	JASA PRAMUWISATA
1094	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL
1095	82301	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN
1096	82302	JASA EVENT ORGANIZER
1097	82920	JASA PENGEPAKAN
1098	85111	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH
1099	85112	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH
1100	85121	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
1101	85122	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
1102	85210	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH
1103	85220	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
1104	85230	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH
1105	85240	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
1106	85311	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH
1107	85312	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH
1108	85321	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA
1109	85322	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA
1110	85410	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI
1111	85420	JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
1112	85430	JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH
1113	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
1114	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
1115	85493	JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
1116	85494	JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA
1117	85495	JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
1118	85496	JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT
1119	85497	JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA
1120	85498	JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
1121	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
1122	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN
1123	85601	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
1124	85602	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
1125	85603	JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA
1126	85604	JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK
1127	86101	JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH
1128	86102	JASA PUSKESMAS
1129	86103	JASA RUMAH SAKIT SWASTA
1130	86104	JASA POLIKLINIK SWASTA
1131	86109	JASA RUMAH SAKIT LAINNYA
1132	86201	PRAKTIK DOKTER UMUM
1133	86202	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
1134	86203	PRAKTIK DOKTER GIGI
1135	86901	JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS
1136	86902	JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
1137	86903	JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN
1138	86904	JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)
1139	90001	KEGIATAN SENI PERTUNJUKAN
1140	90002	KEGIATAN PEKERJA SENI
1141	90003	JASA PENUNJANG HIBURAN
1142	90004	JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI
1143	90005	JURNALIS BERITA INDEPENDEN
1144	90009	KEGIATAN HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA
1145	91021	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH
1146	91022	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA
1147	91023	PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA PEMERINTAH
1148	91024	PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA SWASTA
1149	91025	TAMAN BUDAYA
1150	91029	WISATA BUDAYA LAINNYA
1151	91031	KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM
1152	91032	TAMAN NASIONAL (TN)
1153	91033	TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)
1154	91034	TAMAN WISATA ALAM (TWA)
1155	91035	HUTAN LINDUNG (HL), SUAKA MARGASATWA (SM), DAN CAGAR ALAM (CA)
1156	91036	TAMAN LAUT
1157	91037	TAMAN BURU DAN KEBUN BURU
1158	91039	KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA
1159	93112	LAPANGAN GOLF
1160	93113	GELANGGANG BOWLING
1161	93114	GELANGGANG RENANG
1162	93115	LAPANGAN SEPAK BOLA
1163	93116	LAPANGAN TENIS LAPANGAN
1164	93117	KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER
1165	93118	SPORT CENTRE
1166	93119	KEGIATAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA
1167	93191	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA
1168	93193	KEGIATAN PERBURUAN
1169	93199	KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA
1170	93210	KEGIATAN TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN
1171	93221	PEMANDIAN ALAM

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
1172	93222	WISATA GUA
1173	93223	WISATA PETUALANGAN ALAM
1174	93229	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA
1175	93231	WISATA AGRO
1176	93232	TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA
1177	93233	KOLAM PEMANCINGAN
1178	93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA
1179	93241	ARUNG JERAM
1180	93242	WISATA SELAM
1181	93243	DERMAGA MARINA
1182	93249	WISATA TIRTA LAINNYA
1183	93292	KARAOKE KELUARGA
1184	93293	USAHA ARENA PERMAINAN
1185	93299	KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL
1186	96111	JASA PANGKAS RAMBUT
1187	96112	JASA SALON KECANTIKAN
1188	96122	SPA (SANTE PAR AQUA)
1189	96129	JASA KEBUGARAN LAINNYA

B. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00.

Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021:

Gaji dan tunjangan	Rp 16.500.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan/bulan	Rp500.000,00
Iuran Pensiun/bulan	<u>Rp330.000,00</u>
	(Rp 830.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 15.670.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp15.670.000,00	Rp188.040.000,00
PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp125.040.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00	
15% x Rp75.040.000,00 = <u>Rp 11.256.000,00</u>	
	Rp 13.756.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp13.756.000,00/12	Rp 1.146.333,00

- b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan Januari 2021:

Gaji dan tunjangan	Rp16.500.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 330.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	(Rp 1.146.333,00)
Penghasilan setelah pajak	Rp 15.023.667,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 1.146.333,00</u>
Jumlah yang diterima	Rp16.170.000,00

2. Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Februari 2021 menerima gaji dan tunjangan

sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00.

Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp252.000.000,00 (Rp21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Februari 2021 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.

3. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Februari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp10.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp180.000.000,00 (Rp15.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Februari 2021:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan/bulan	Rp500.000,00
Iuran Pensiun/bulan	<u>Rp300.000,00</u>
	(Rp 800.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 14.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp14.200.000,00	Rp170.400.000,00
PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp107.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp57.400.000,00 =	<u>Rp 8.610.000,00</u>
	Rp 11.110.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp11.110.000,00/12	Rp 925.833,00

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Februari 2021:

Gaji dan tunjangan setahun	Rp 180.000.000,00
THR	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 190.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan setahun maksimal	Rp6.000.000,00
Iuran Pensiun setahun	<u>Rp3.600.000,00</u>
	<u>(Rp 9.600.000,00)</u>
Penghasilan Neto	Rp180.400.000,00
PTKP (K/1)	<u>(Rp 63.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp117.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00	
15% x Rp67.400.000,00 = <u>Rp10.110.000,00</u>	
	Rp 12.610.000,00
PPh Pasal 21 atas THR:	
PPh 21 atas seluruh penghasilan (Gaji, tunjangan, dan THR)	Rp 12.610.000,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap (Gaji dan tunjangan)	<u>(Rp 11.110.000,00)</u>
PPh Pasal 21 atas THR	Rp 1.500.000,00
Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp1.500.000,00.	

c. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Februari 2021:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
THR	Rp 10.000.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 300.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan	<u>(Rp 2.425.833,00)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp 22.274.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP	Rp <u>925.833,00</u>
Jumlah yang diterima	Rp 23.200.000,00

4. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp1.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp15.000.000,00 + Rp1.000.000,00) x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
Tunjangan PPh Pasal 21	<u>Rp 1.000.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 16.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp500.000,00
Iuran Pensiun	<u>Rp300.000,00</u>
	<u>(Rp 800.000,00)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 15.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp15.200.000,00	Rp 182.400.000,00
PTKP (K/1)	<u>(Rp 63.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp119.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00	
15% x Rp69.400.000,00 = <u>Rp 10.410.000,00</u>	
	Rp 12.910.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp12.910.000,00/12	Rp 1.075.833,00

- b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Januari 2021:

Gaji dan tunjangan	Rp15.000.000,00
Tunjangan PPh	Rp 1.000.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 300.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	<u>(Rp 1.075.833,00)</u>

Penghasilan setelah pajak	Rp14.624.167,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 1.075.833,00</u>
Jumlah yang diterima	Rp15.700.000,00

C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

Nomor : (1)

Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (2)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)

NPWP : (4)

Jabatan : (5)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Kode KLU : (8)

Alamat : (9)

memberitahukan: (10)

Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang
terutang sebesar 50%

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Masa
Pajak 2021 sampai dengan 2021.

Demikian disampaikan.

.....,20.... (11)

(12)

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN
INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth. (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., Saudara berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan:

- termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...
- termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...

Demikian kami sampaikan.

....., 20.... (6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)



*) Pilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK
MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

E. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN
INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth.

..... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan
Nomor (4) tanggal (5) dengan ini diberitahukan bahwa
berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor tentang ..., Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan
Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran
PPh Pasal 25*), dengan alasan:

tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21
Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
... tentang ...

tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan
Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor ... tentang ...

Demikian kami sampaikan.

....., 20.... (6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)



*) pilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK
MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi : Normal Pembetulan *)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU : (3)
Masa Pajak : (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (6)	Rp (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2021 (8)	Rp (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	Jumlah (Rp) (13)	
			Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah		 (7) (9)

Demikian laporan disampaikan.

....., 20.... (14)

(15)

..... (16)

NPWP: (17)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- Nomor (3) : Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan NPWP yang lengkap dan valid dari pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 DTP hasil perhitungan yang benar tiap pegawai dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).
- Nomor (17) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan).

G. CONTOH PENGHITUNGAN PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan N memiliki usaha rumah makan. Tuan N terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Desember 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang PPh. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan N memperoleh peredaran bruto dari usaha rumah makan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena peredaran bruto yang diterima oleh Tuan N dari usaha rumah makan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan dari usaha rumah makan untuk Tahun Pajak 2021 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha rumah makan sebagai berikut:

Masa Pajak	Peredaran Bruto	PPh Final Terutang
Januari 2021	Rp 40.500.000,00	Rp 202.500,00

Atas PPh final Masa Pajak Januari 2021 tersebut Tuan N berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung Pemerintah dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021, sehingga Tuan N tidak menyetor PPh final ke kas negara.

Dalam hal Tuan N tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka Tuan N tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya.

2. PT XYZ memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Juli 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum

UU PPh sehingga pada Tahun Pajak 2020 PT XYZ dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pada Tahun Pajak 2020, PT XYZ memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Karena peredaran bruto yang diperoleh PT XYZ tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan PT XYZ dari usaha untuk Tahun Pajak 2021 juga dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pada bulan Januari 2021, PT XYZ memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT MPN sebesar Rp10.000.000,00 dan PT XYZ dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.

PT MPN selaku Pemotong kemudian melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan dan diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi sehingga PT MPN tidak melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut.

PT MPN memberikan cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2021 dan PT XYZ harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah atas transaksi tersebut.

Dalam hal PT XYZ tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka PT XYZ tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya.

H. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Status Laporan Realisasi : Normal Pembetulan *)

Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jumlah					

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	Peredaran Bruto (9)	PPh Final DTP (10)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (11)

(12)

..... (13)

NPWP: (14)

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lokasi usaha.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP lokasi usaha.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Rupiah Peredaran Bruto dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Rupiah seluruh Peredaran Bruto dari transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau nama Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.
- Nomor (14) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.

I. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemotong Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP Wajib Pajak (4)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (5)	Rp (6)
Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak 2021 (7)	Rp (8)

Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP:

No. (9)	Nama Wajib Pajak (10)	NPWP (11)	Penghasilan Bruto	PPh Final Jasa Konstruksi DTP
Jumlah		 (6) (8)

Demikian laporan disampaikan.

....., 20 ... (12)

(13)

..... (14)

NPWP: (15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.

J. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
1	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
2	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
3	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI
4	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
5	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
6	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
7	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN
8	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN
9	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
10	41020	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
11	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
12	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
13	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
14	42114	KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API
15	42115	KONSTRUKSI TEROWONGAN
16	42120	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API
17	42211	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI
18	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
19	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
20	42214	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI
21	42215	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA
22	42216	KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
23	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI
24	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
25	42219	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
26	42220	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
27	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
28	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN
29	42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
30	42914	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS
31	42915	PENGERUKAN
32	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
33	42920	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA
34	43110	PEMBONGKARAN
35	43120	PENYIAPAN LAHAN
36	43211	INSTALASI LISTRIK
37	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI
38	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI
39	43214	INSTALASI NAVIGASI UDARA
40	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
41	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
42	43217	INSTALASI ELEKTRONIKA
43	43221	INSTALASI AIR (PIPA)
44	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL
45	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS
46	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
47	43291	INSTALASI MEKANIKAL

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
48	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL
49	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM
50	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON
51	43303	PENGECATAN
52	43304	DEKORASI INTERIOR
53	43305	DEKORASI EKSTERIOR
54	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
55	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
56	43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)
57	43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING
58	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA
59	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR
60	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL
61	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
62	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
63	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN
64	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
65	49214	ANGKUTAN BUS KOTA
66	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA
67	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS
68	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
69	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS
70	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS
71	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN
72	49414	ANGKUTAN PERDESAAN
73	49421	ANGKUTAN TAKSI
74	49422	ANGKUTAN SEWA
75	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
76	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
77	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA
78	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
79	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
80	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
81	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
82	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL
83	56101	RESTORAN
84	56102	WARUNG MAKAN
85	56103	KEDAI MAKANAN
86	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
87	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
88	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
89	56301	BAR
90	56303	RUMAH MINUM/KAFE
91	56304	KEDAI MINUMAN
92	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
93	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
94	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
95	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN
96	86201	PRAKTIK DOKTER UMUM
97	86202	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
98	86203	PRAKTIK DOKTER GIGI
99	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG
100	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK
101	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
102	50215	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
103	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
104	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
105	50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN
106	50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
107	50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
108	50221	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN
109	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
110	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
111	50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
112	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA
113	50135	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT
114	50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
115	50144	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT
116	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA
117	50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
118	50143	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG
119	50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN
120	50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
121	50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
122	50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
123	50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
124	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK
125	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
126	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
127	50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
128	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR
129	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
130	50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS
131	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
132	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG

K. FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Jabatan :(6)

Bertindak selaku *) : [] Wajib Pajak
[] Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)
NPWP :(8)
Kode KLU :(9)
Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., dengan alasan:

[] termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20.... (11)

Pemohon,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama terang pemohon.

L. FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

NOMOR :(2)

TANGGAL :(3)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
.....(4)

NPWP :
.....(5)

Kode KLU :
.....(6)

Alamat :
.....(7)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang....., dengan alasan:

termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 2021.



Kode verifikasi:

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

M. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.

.....

..... (3)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan:

tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....

Demikian kami sampaikan.



Kode verifikasi:

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan

N. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU : (3)
Masa Pajak : (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB *) (6)	Tanggal PIB (7)	Nilai Impor **) (8)	PPh 22 Impor (9)
	Jumlah (8)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (10)

(11)

..... (12)

NPWP..... (13)

*) : Nomor PIB atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.

***) : Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya).

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan sesuai periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

O. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
1	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
2	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
3	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI
4	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
5	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
6	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
7	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN
8	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN
9	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
10	41020	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
11	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
12	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
13	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
14	42114	KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API
15	42115	KONSTRUKSI TEROWONGAN
16	42120	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API
17	42211	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI
18	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
19	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
20	42214	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI
21	42215	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA
22	42216	KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
23	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI
24	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
25	42219	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
26	42220	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
27	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
28	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN
29	42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
30	42914	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS
31	42915	PENGERUKAN
32	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
33	42920	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA
34	43110	PEMBONGKARAN
35	43120	PENYIAPAN LAHAN
36	43211	INSTALASI LISTRIK
37	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI
38	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI
39	43214	INSTALASI NAVIGASI UDARA
40	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
41	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
42	43217	INSTALASI ELEKTRONIKA
43	43221	INSTALASI AIR (PIPA)
44	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL
45	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS
46	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
47	43291	INSTALASI MEKANIKAL
48	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL
49	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNUM
50	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON
51	43303	PENGECATAN
52	43304	DEKORASI INTERIOR
53	43305	DEKORASI EKSTERIOR
54	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
55	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
56	43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)
57	43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING
58	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA
59	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR
60	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL
61	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
62	49112	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA
63	49121	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG
64	49129	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA
65	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
66	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN
67	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
68	49214	ANGKUTAN BUS KOTA
69	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA
70	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS
71	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
72	49300	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
73	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS
74	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS
75	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN
76	49414	ANGKUTAN PERDESAAN
77	49421	ANGKUTAN TAKSI
78	49422	ANGKUTAN SEWA
79	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
80	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
81	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA
82	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
83	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
84	49432	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS
85	49433	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
86	51101	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
87	51102	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
88	51103	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG
89	51104	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
90	51105	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
91	51106	ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA
92	51107	ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA
93	51109	ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA
94	51201	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
95	51202	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
96	51203	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG
97	51204	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
98	51205	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
99	52101	PERGUDANGAN

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
100	52102	JASA COLD STORAGE
101	52103	JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT
102	52109	JASA PERGUDANGAN LAINNYA
103	52211	JASA TERMINAL DARAT
104	52213	JASA JALAN TOL
105	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
106	52221	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT
107	52222	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU
108	52223	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN
109	52229	JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA
110	52230	JASA KEBANDARUDARAAN
111	52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)
112	52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)
113	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
114	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL
115	53200	KURIR
116	55111	HOTEL BINTANG LIMA
117	55112	HOTEL BINTANG EMPAT
118	55113	HOTEL BINTANG TIGA
119	55114	HOTEL BINTANG DUA
120	55115	HOTEL BINTANG SATU
121	55120	HOTEL MELATI
122	55130	PONDOK WISATA (HOME STAY)
123	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
124	55192	BUMI PERKEMAHAN
125	55193	PERSINGGAHAN KARAVAN
126	55194	VILA
127	55195	APARTEMEN HOTEL
128	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
129	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA
130	56101	RESTORAN
131	56102	WARUNG MAKAN
132	56103	KEDAI MAKANAN
133	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
134	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
135	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
136	56301	BAR
137	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIKAN MINUMAN
138	56303	RUMAH MINUM/KAFE
139	56304	KEDAI MINUMAN
140	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
141	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
142	85111	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH
143	85112	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH
144	85121	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
145	85122	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
146	85210	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH
147	85220	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
148	85230	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH
149	85240	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
150	85311	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
151	85312	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH
152	85321	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA
153	85322	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA
154	85410	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI
155	85420	JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
156	85430	JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH
157	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
158	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
159	85493	JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
160	85494	JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA
161	85495	JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA
162	85496	JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT
163	85497	JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA
164	85498	JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI
165	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
166	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN
167	85601	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH
168	85602	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
169	85603	JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA
170	85604	JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK
171	86101	JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH
172	86102	JASA PUSKESMAS
173	86103	JASA RUMAH SAKIT SWASTA
174	86104	JASA POLIKLINIK SWASTA
175	86109	JASA RUMAH SAKIT LAINNYA
176	86201	PRAKTIK DOKTER UMUM
177	86202	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
178	86203	PRAKTIK DOKTER GIGI
179	86901	JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS
180	86902	JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
181	86903	JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN
182	86904	JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)
183	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG
184	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK
185	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG
186	50215	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
187	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
188	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
189	50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN
190	50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
191	50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
192	50221	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN
193	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
194	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
195	50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
196	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA
197	50135	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT
198	50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
199	50144	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
200	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA
201	50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
202	50143	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG
203	50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN
204	50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
205	50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
206	50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
207	50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
208	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK
209	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
210	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
211	50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
212	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR
213	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
214	50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS
215	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
216	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG

P. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

1. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

- a. Bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021.

PT A memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Desember 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari 2021 dan dinyatakan berhak. PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Dengan demikian, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT A mulai Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampaian laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu.

Pada tanggal 31 Juli 2021 PT A menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal

25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 (besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2020 dikurangi 50%)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 (40.000.000 x 50%)	Rp20.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021	Rp20.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (40.000.000 x 50%)	Rp20.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021	Rp20.000.000,00

- b. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021.

PT B tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Desember 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (menggunakan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2020).

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan tidak memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B mulai Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 tetap sebesar Rp.40.000.000,-.

Pada tanggal 31 Juli 2021 PT B menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa

Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Angsuran Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2020)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021	Rp40.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (40.000.000 x 50%)	Rp20.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021	Rp20.000.000,00

2. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa)

Pada Tahun Pajak 2021, PT C memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak

Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2021 sebagai berikut:

Laporan Triwulan	Januari – Maret	April – Juni	Juli-September
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00	Rp9.800.000.000,00
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp200.000.000,00

PT C menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari 2021 dan dinyatakan berhak. Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampailan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu. Pada tanggal 31 Juli 2021 PT C menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April - Juni	Juli - September	Oktober - Desember
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00	Rp9.800.000.000,00
PPH Terutang	Rp399.000.000,00	Rp893.000.000,00	Rp1.862.000.000,00
Dikurangi:			
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp200.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp324.000.000,00	Rp768.000.000,00
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp174.000.000,00	Rp444.000.000,00	Rp894.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp58.000.000,00	Rp148.000.000,00	Rp298.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	Rp29.000.000,00 (Rp58.000.000,00 x 50%)	Rp74.000.000,00 (Rp148.000.000,00 x 50%)	Rp149.000.000,00 (Rp298.000.000,00 x 50%)
Angsuran setelah pengurangan PPh Pasal 25	Rp29.000.000,00	Rp74.000.000,00	Rp149.000.000,00

Q. FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	Masa Pajak 2021 (3)	
	PPh Terutang (Rp) (5)	Pengurang Angsuran (Rp) (6)

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (7)

(8)

..... (9)

NPWP: (10)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan periode pelaporan (Masa Pajak).
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah rupiah PPh Pasal 25 Terutang.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah rupiah besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) yang membuat laporan.

R. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
1	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
2	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
3	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI
4	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
5	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
6	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
7	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN
8	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN
9	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
10	41020	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
11	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
12	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
13	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
14	42114	KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API
15	42115	KONSTRUKSI TEROWONGAN
16	42120	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API
17	42211	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI
18	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
19	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
20	42214	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI
21	42215	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA
22	42216	KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
23	42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI
24	42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
25	42219	KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
26	42220	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
27	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
28	42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN
29	42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
30	42914	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS
31	42915	PENGERUKAN
32	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
33	42920	PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA
34	43110	PEMBONGKARAN
35	43120	PENYIAPAN LAHAN
36	43211	INSTALASI LISTRIK
37	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI
38	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI
39	43214	INSTALASI NAVIGASI UDARA
40	43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
41	43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
42	43217	INSTALASI ELEKTRONIKA
43	43221	INSTALASI AIR (PIPA)
44	43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL
45	43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS
46	43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
47	43291	INSTALASI MEKANIKAL
48	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL
49	43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM
50	43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON
51	43303	PENGECATAN
52	43304	DEKORASI INTERIOR
53	43305	DEKORASI EKSTERIOR
54	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
55	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
56	43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER)
57	43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING
58	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA
59	43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR
60	43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL
61	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG
62	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)
63	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN
64	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
65	49214	ANGKUTAN BUS KOTA
66	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA
67	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS
68	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA
69	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS
70	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS
71	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN
72	49414	ANGKUTAN PERDESAAN
73	49421	ANGKUTAN TAKSI
74	49422	ANGKUTAN SEWA
75	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
76	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR
77	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA
78	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG
79	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM
80	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
81	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
82	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL
83	56101	RESTORAN
84	56102	WARUNG MAKAN
85	56103	KEDAI MAKANAN
86	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
87	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
88	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
89	56301	BAR
90	56303	RUMAH MINUM/KAFE
91	56304	KEDAI MINUMAN
92	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
93	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP
94	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
95	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN
96	86201	PRAKTIK DOKTER UMUM
97	86202	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
98	86203	PRAKTIK DOKTER GIGI
99	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG
100	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK
101	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG

NO.	KODE	NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
102	50215	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
103	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
104	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
105	50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN
106	50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
107	50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
108	50221	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN
109	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
110	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
111	50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
112	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA
113	50135	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT
114	50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG
115	50144	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT
116	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA
117	50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
118	50143	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG
119	50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN
120	50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
121	50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
122	50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
123	50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
124	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK
125	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG
126	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG
127	50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG
128	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR
129	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
130	50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS
131	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG
132	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG

S. PETUNJUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH

1. Contoh permohonan pengembalian pendahuluan melalui SPT Masa PPN.

PT ABC dengan KLU termasuk dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan sesuai dengan Peraturan Menteri ini melalui SPT Masa PPN. Untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan tersebut, PT ABC harus mengisi formulir 1111 SPT Masa PPN pada Romawi II huruf H sebagai berikut:

- a. Pada butir 2 dipilih:

- 1) Butir 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN, dalam hal pada Masa Pajak tersebut PKP melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN; atau
- 2) Butir 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN, dalam hal pada Masa Pajak tersebut PKP tidak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN.

- b. Pada butir 3 dipilih butir 3.2 Dikembalikan (restitusi) dan memilih Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan.

2. Contoh pengembalian pendahuluan yang diberikan kepada PKP meskipun kelebihan pajak hanya disebabkan karena kompensasi Masa Pajak sebelum-sebelumnya.

PT BCD dengan KLU termasuk dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2021 dengan ringkasan informasi sebagai berikut:

- a. Tidak ada Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri oleh PKP selama Masa Pajak September 2021 karena tidak ada

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak selama Masa Pajak ..

- b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.000.000.000,00 yang seluruhnya merupakan kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak Agustus 2021.

PT BCD mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 3.000.000.000,00, dengan mencantumkan pilihan restitusi untuk PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN sebagaimana dimaksud pada contoh 1 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2021.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001